

Hari, Tanggal : Rabu, 06 April 2022

Waktu : 13:30 – 14:30 WITA

Tempat : Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Hasanuddin

**ABUSTAM SEBAGAI WALIKOTA KOTAMADYA UJUNG PANDANG
(1978-1983)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin
Oleh**

MUSDALIPAH

F061171503

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**ABUSTAM SEBAGAI WALIKOTA KOTAMADYA UJUNG PANDANG
(1978-1983)**

Disusun dan diajukan oleh:

MUSDALIPAH

F061171503

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 06 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Dr. Suriadi Mappangara, M. Hum
NIP. 195709121985031003

Dr. Muh. Bahar Akkase Teng, Lcp., M. Hum
NIP. 195712191989031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 196403161991031010

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**

Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP. 197608272008011011

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Rabu, 06 April 2022, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**ABUSTAM SEBAGAI WALIKOTA KOTAMADYA UJUNG PANDANG
(1978-1983)**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.



Makassar, 06 April 2022

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum | Ketua |  |
| 2. Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng.,Lcp. M. Hum | Sekretaris |  |
| 3. Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A. | Penguji I |  |
| 4. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Penguji II |  |
| 5. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum | Konsultan I |  |
| 6. Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng.,Lcp. M. Hum | Konsultan II |  |

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : MUSDALIPAH

NIM : F061171503

Departemen/program studi : Ilmu Sejarah/Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

"ABUSTAM SEBAGAI WALIKOTA KOTAMADYA UJUNG PANDANG (1978-1983)"

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Kepenulisan ini sesuai dengan kaidah kepenulisan akademik, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah inidan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya unsur-unsur plagiarisme dan tidak dibuktikan dengan metode historiografinya, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Indonesian postage stamp is affixed to the document. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAN TEMPEL' and 'MUSDALIPAH'. A handwritten signature is written over the stamp. The serial number '8909AJXB66932804' is visible at the bottom of the stamp.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas segala kelimpahan berkah, rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula penulis haturkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulisan dalam memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana sastra Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan akibat keterbatasan sumber dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Karenanya besar harapan penulis akan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, bapak **Lamma Tandirerung** dan ibu **Manna** atas segala dukungan selama menempuh Pendidikan dan doa yang tiada hentinya ditujukan kepada penulis. Serta kepada saudara **Nur Hajat, Muh. Abu Tholib, Nurul Magh Fira dan Zaidan Alfaridzki**, penulis ucapkan terimah kasih atas segala support, canda tawa yang selalu ada setiap harinya.

Selain itu penulis juga ucapakan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. **Dr. Suriadi Mappangara, M. Hum** dan **Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, Lcp., M.Hum**, selaku peming I dan pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan bimbingan serta arahan yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga apa yang telah diberikan dan disampaikan oleh kedua pembimbing terhadap penulis, bernilai pahala dan ibadah dihadapan Allah SWT.
2. Bapak **Prof. Akin Duli, M.A**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
3. **Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.** Selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis dari awal hingga menjelang akhir penyelesaian skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ketua Departemen Ilmu Sejarah bapak **Dr. Ilham S.S., M.Hum** dan Ibu **Lili Evita S.S., M.Hum** selaku sekretaris Departemen . Serta ucapan terima kasih kepada seluruh dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. **Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A (Alm)**, **Margriet Moka Lappia, S.S, M.S. (Almh)**, **Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A**, **Dr. Muslimin Effendy, M.A.**, **Nasihin S.S, M.A.**, **Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum**, **Nahdia Nur, M.Hum**, **Drs. Rasyid Rahman, M.ag** dan **Dr.Bambang Sulistyو Edi P. M.S.**, atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah.

5. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala secretariat Departemen Ilmu Sejarah, **Udji Usman Pati S.Sos** atas segala bantuannya kepada penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal semester hingga selesainya skripsi ini.
6. Kepada kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh stafnya yang telah banyak memberikan bantuan dan pelayanan pembacaan arsip kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ucapkan terima kasih.
7. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi mengenai judul yang penulis teliti.
8. Untuk teman-teman terbaik **Syamsurianti.L, Syamsuriati A, Nur Haeni, Nur syamsi, Nur Afni , Rosmita** dan teman-teman **Sangkapu Banne** terima kasih atas segala kerja sama dan kebersamaan yang terjalin selama ini.
9. Untuk teman-teman seperjuangan di markas Kuning Abu-Abu yang selalu menemani berbagi keluh kesah, **Harmina, Khaerani, Faridah, Aprilianti Sawe, Anisa, Siti Arika, Nurjannah, Rinaldi, Muh. Irfan, Muh Tribudiman** dan **Ramin Indrawan**. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Sejarah 2017 **Muh. Ilham Rani, Anda Aliefka Priyatma, Khaerani, Rinaldi, Muh. Irfan, Nur Ismi, Ramin**

Indrawan, Yusrah, Rustan, Muh. Jihad Rahman, Aprilianti Sawe, Bella Astari Patta, Anisa, Harmina Muhammad Bayu Arianto, St. Ainung Rahmi, Fahmi Sukarta, Anisa Devy, Rifsanjani, Vivin Rindiani, Taufiqul Akbar Umagap, Nurjannah, Fiqham Arsyad Putra, St. Khadijah Muslimin, Rismayani Banne, Faridah, Siti Arika, Muh. Tri Budiman, Nurhazizah, Arya Yulia Andika K dan Muh. Nur Ikhsan. Terima kasih atas segala kebersamaan, canda tawa selama masa perkuliahan.

11. Kepada Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Benteng Alla yang telah menjadi rumah sekaligus tempat belajar bagi penulis. Tempat penulis saling berbagi ilmu dengan senior-senior yang namanya tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu, arahan serta saran yang diberikan selama ini. Untuk adik-adik terus semangat dan persembahkan segala sesuatu yang luar biasa untuk IPPMBA tercinta.
12. Kepada HUMANIS KMFIB UH penulis ucapkan terima kasih yang sangat dalam telah menjadi rumah, tempat belajar, bersosialisasi dan mencari pengalaman yang luar biasa. Kepada keluarga besar HUMANIS yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala arahan dan sarannya selama penulis berlembaga di HUMANIS.
13. Forum Lingkar Pena Ranting Universitas Hasanuddin merupakan tempat dimana penulis mendapatkan apa yang selama ini penulis inginkan. Penulis dapat belajar membuat karya seperti novel, puisi, cerita pendek,

bahkan belajar menjadi diri sendiri berkat segala arahan dari senior-senior dan keluarga besar FLP Ranting Unhas. Karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis bangga dan beruntung pernah dipertemukan dengan orang-orang luar biasa.

14. Teruntuk **IPQHA** terima kasih telah menjadi tempat bagi penulis untuk belajar ilmu agama. Dari awal memasuki SD hingga sampai saat ini. Terima kasih kepada senior-senior yang selalu ada ketika penulis mengalami kesulitan. Semoga kedepannya IPQHA semakin melahirkan kader-kader yang berakhlakul karimah.

15. Untuk keluarga besar terutama team persepupuan **Nur Karimah, Abd. Halim, Kaharuddin, Uswadi Daud, Hamida, Ansyar Latief** dan **Hanapiah**. Terima kasih telah menghibur penulis dengan meramaikan grup tiap harinya.

Untuk berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya penulis dengan mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun guna melengkapi segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR KATA SINGKATAN | xii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2 BATASAN MASALAH..... | 5 |
| 1.3 RUMUSAN MASALAH | 6 |
| 1.4 TUJUAN DAN MANFAAT | 6 |
| 1.5 TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 1.6 METODE PENELITIAN | 10 |
| 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN | 15 |
| BAB II GAMBARAN UMUM..... | 16 |
| 2.1 SEJARAH SINGKAT KOTA MAKASSAR..... | 16 |
| 2.2 POSISI KOTA MAKASSAR SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN | 20 |
| 2.3 PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTAMADYA UJUNG PANDANG..... | 26 |
| 2.4 KONDISI EKONOMI..... | 29 |
| BAB III RIWAYAT HIDUP DAN PERJALANAN KARIR ABUSTAM DALAM POLITIK SERTA PEMERINTAHAN SEBAGAI WALIKOTA KOTAMADYA UJUNG PANDANG | 33 |
| 3.1 BIOGRAFI SINGKAT LETKOL.INF. ABUSTAM | 33 |

| | |
|--|----|
| 3.2 PROSES TERPILIHNYA ABUSTAM SEBAGAI WALIKOTA KOTAMADYA UJUNG PANDANG | 36 |
| 3.3 KEPEMIMPINAN ABUSTAM | 40 |
| BAB IV KEBIJAKAN SERTA TANTANGAN ABUSTAM DALAM PEMBANGUNAN PADA MASA PEMERINTAHAN WALIKOTA UJUNG PANDANG 1978-1983 | 45 |
| 4.1 ORGANISASI PEMERINTAHAN | 46 |
| 4.2 KEBIJAKAN DI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN | 52 |
| 4.3 PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG | 54 |
| 4.3.1 Bina Perbaikan Lingkungan | 58 |
| 4.3.2 Pembinaan kesejahteraan Keluarga..... | 71 |
| BAB V KESIMPULAN | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN | 82 |

DAFTAR KATA SINGKATAN

| No. | Kata Singkatan | Keterangan |
|-----|----------------|--|
| 1. | ABRI | Angkatan Bersenjata Republik Indonesia |
| 2. | APRIS | Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat |
| 3. | AJEN | Ajudan Jendral |
| 4. | AD | Angkatan Darat |
| 5. | Bappeda | Badan Perencanaan pembangunan, Pendidikan, dan Pengembangan Daerah |
| 6. | CTN | Corps Tjadangan Nasional |
| 7. | DI/TII | Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia |
| 8. | Dan Yon | Komandan Batalyon |
| 9. | Dan Dim | Distrik Militer |
| 10. | DPR | Dewan Perwakilan Rakyat |
| 11. | Golkar | Golongan Karya |
| 12. | Kasdam | Kepala Staff Kodam |
| 13. | Kasdim | Kepala Staff Kodim |
| 14. | KGSS | Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan |
| 15. | KNIL | Koninklijke Nederlands Indische Leger (Angkatan Perang Kolonial Hindia Belanda/ Tentara Kerajaan Hindia Belanda) |
| 16. | Kodam | Komando Daerah Militer |
| 17. | Kodim | Komando Distrik Militer |
| 18. | Korem | Komando Resort Militer |
| 20. | Laksus | Pelaksana Khusus |
| 21. | Letda | Letnan Dua |
| 22. | Letkol | Letnan Kolonel |
| 23. | Lettu | Letnan Satu |
| 24. | Muspida | Musyawaharah Pimpinan Daerah |
| 25. | NIT | Negara Indonesia Timur |
| 26. | NICA | Netherland Indies Civil Administration (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) |
| 27. | NU | Nahdatul Ulama |
| 28. | Permesta | Perjuangan Semesta Alam |
| 29. | Pemda | Pemerintah Daerah |
| 30. | PDI | Partai Demokrasi Indonesia |
| 31. | PKI | Partai Komunis Indonesia |

| | | |
|-----|----------------|--|
| 32. | PAM | Perusahaan Air Minum |
| 33. | PNI | Partai Nasional Indonesia |
| 34. | PPKI | Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia |
| 35. | PPP | Partai Persatuan Pembangunan |
| 36. | PSII | Partai Syarikat Islam Indonesia |
| 37. | Suspala | Kursus Lanjutan Perwira |
| 38. | Sustar Dan Dim | Kursus Penataran Komandan Kodim |
| 39. | TNI | Tentara Nasional Indonesia |
| 40. | TKR | Tentara Keamanan Rakyat |
| 41. | TON | Peleton |
| 42. | VOC | Vereenigde Oostindische Compagnie (Gabungan Perusahaan- Perusahaan Dagang Belanda untuk Perdagangan di Hindia Timur. |
| 43. | Wa Dan Yon | Wakil Komandan Batalyon |
| 44. | Yon | Batalyon |

ABSTRAK

Musdalipah (F061171503), “Abustam Sebagai Walikota Kotamadya Ujung Pandang 1978-1983”, dibimbing oleh Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum Dan Dr. H.Muh. Bahar Akkase Teng,Lcp,M.Hum.

Penelitian ini membahas tentang pemerintahan Abustam selaku walikota di Kotamadya Ujung Pandang tahun 1978 dan berakhir pada 1983. Abustam memulai karirnya dari bidang militer dengan pangkat terakhir letnan kolonel. Abustam dilantik oleh Andi Oddang selaku gubernur Sulawesi Selatan sebagai perwakilan dari Menteri Dalam Negeri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang dilakukan di badan Dinas kearsipan dan perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan serta penambahan informan melalui wawancara.

Pemerintahan di Kotamadya Ujung Pandang pada masa Abustam masih diatur oleh pemerintah propinsi dan pemerintahan pusat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan. Organisasi pemerintahan pada masa pemerintahan juga mulai mengalami peningkatan. Seperti dibentuknya Bappeda dengan tujuan melakukan perencanaan dalam pembangunan agar lebih terarah dan menyeluruh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama Abustam menjabat sebagai walikota beliau mengalami banyak permasalahan mulai dari masalah kesehatan, pendidikan dan prasarana jalan. Karenanya program kerja yang digagas dari pemerintah bertujuan untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Terlepas dari permasalahan yang dihadapi, Abustam mampu memimpin kotamadya Ujung Pandang hingga 1983.

Kata kunci: Kotamadya Ujung Pandang, Pemerintahan daerah

ABSTRACT

Musdalipah (F061171503), “Abustam as Mayor of Ujung Pandang Municipality 1978-1983”, supervised by Dr. Suriadi Mappangara, M. Hum and Dr. H.Muh. Bahar Akkase Teng, Lcp, M. Hum.

This research is about Abustam's government as mayor of Ujung Pandang Municipality in 1978 and ended in 1983. Abustam started from the military field with the last rank of lieutenant colonel. Abustam was appointed by Andi Oddang as the governor of South Sulawesi as a representative of the Minister of Home Affairs. In this study, the authors used historical research methods by collecting data sources carried out at the Regional Archives and Library Office of South Sulawesi Province and adding informants through interviews.

The government in Ujung Pandang Municipality during the Abustam period was still regulated by the provincial government and the central government in accordance with the 1974 Law of the Republic of Indonesia concerning the principles of governance. Government organizations during the reign also began to increase. Such as the formation of Bappeda with the aim of planning in development to be more focused and comprehensive.

The results of this study indicate that during Abustam as mayor he experienced many problems ranging from health problems, education and road infrastructure. Therefore, the work program initiated by the government aims to overcome the existing problems. Despite the problems faced, Abustam was able to lead the municipality of Ujung Pandang until 1983.

Keywords: Ujung Pandang Municipality, Local government

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam sejarahnya yang cukup panjang sebagai kota yang awalnya tumbuh dan berkembang dari kota pantai yang dibangun sejak masa kolonial, Makassar atau Ujung Pandang telah diperintah oleh berbagai tokoh yang pernah menjabat sebagai walikota dan melaksanakan sejumlah kebijakannya dalam hal yang terkait dengan perkembangan kota. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulisan sejarah mengenai biografi tokoh atau catatan hidup seseorang, termasuk walikota yang pernah menjabat di suatu kota menjadi cukup menarik untuk diteliti. Dalam menulis biografi, maka haruslah memperhatikan beberapa hal utama, seperti kepribadian tokohnya, kekuatan sosial yang mendukung, lukisan sejarah zaman, dan keberuntungan serta kesempatan yang datang. Selain itu, juga memperhatikan latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan sosial-budaya, dan perkembangan diri dari tokoh atau seseorang yang hendak diteliti ke depan.¹

Kotamadya Ujung Pandang (Makassar) dalam proses perkembangannya sudah tentu dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah dan partisipasi dari masyarakat di dalamnya. Penelitian ini berfokus pada salah seorang walikota di Makassar, yakni Abustam (menjabat 1978-1983) dengan memperhatikan bagaimana kepemimpinannya serta kebijakan dan tantangan apa yang dihadapi dalam

¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2003), hlm. 203-207.

membangun Kota Makassar yang pada masanya tersebut dikenal dengan nama “Kotamadya Ujung Pandang.”

Sebelum menjabat sebagai Walikota Ujung Pandang, Abustam merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD) dengan pangkat Letnan Kolonel. Ia sendiri ditempatkan di KODIM 1407 yang berada di daerah asalnya, yakni Kabupaten Bone, kemudian dipindahkan ke KODIM 1408 Ujung Pandang. Istrinya, Eny Sakura Abustam, juga menjadi ketua persatuan istri TNI-AD pada 1970.²

Abustam menjabat sejak 1978-1983 menggantikan H.M. Daeng Patompo yang sebelumnya menjadi Walikota Ujung Pandang sejak 1965-1978. Sesuai dengan keputusan DPRD No. 02/I/1/DPRD/1978, Abustam memperoleh suara terbanyak dari tiga calon walikota lainnya. Ia dilantik pada 30 Juni 1978 dan berakhir pada 30 Juni 1983. Sesuai dengan Pasal 17 undang No.5 tahun 1974 mengenai pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Masa jabatan Abustam sebagai walikota hanya berlangsung satu periode yang nantinya akan digantikan oleh Jancy Raib.³

² Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang tahun 1926-1988. No.reg. 847 mengenai calon DPRD tahun 1977.

³ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang tahun 1926-1988. No.reg. 587 mengenai Surat Keputusan Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pada masa pemerintahan Abustam, jabatan dalam pemerintahan banyak dipegang oleh angkatan darat. Seperti Andi Oddang yang pada masa itu menjadi gubernur Sulawesi Selatan.⁴ Bahkan ketua DPRD pun pada masa ini berasal dari angkatan darat. Jabatan-jabatan pada masa ini memang banyak dipegang oleh kalangan Golkar dan tentara.⁵

Sebelum Abustam menjadi walikota, nama Makassar telah berganti menjadi Ujung Pandang pada tahun 1971. Hal ini dikarenakan adanya perluasan wilayah. Makassar yang merupakan pusat segala kegiatan dengan segala bidang yang berkembang dan pertumbuhan penduduk yang meningkat, dipandang perlu untuk memperluas wilayahnya. Karena hal ini, maka melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971, dimasukkanlah sebagian daerah dari Kabupaten Gowa, Maros serta Pangkajene dan Kepulauan menjadi bagian dari Makassar yang sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten yang bersangkutan. Dengan diperluasnya Kota Makassar, maka nama Makassar turut diganti menjadi Ujung Pandang. Perubahan nama ini dimaksud agar terjalin suasana kerja sama yang baik antara daerah kabupaten yang bersangkutan.⁶

⁴ Jayadi Nas, *Konflik Elite di Sulawesi Selatan: Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*, (Makassar: LEPHAS, 2007), hlm. 41.

⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

⁶ M. Dg. Patompo, *Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan Fragmen Revolusi Pembangunan*, (Makassar: Percetakan SMP FRATER Ujung Pandang, 1976), hlm. 137.

Kotamadya Ujung Pandang (Makassar) merupakan kota kolonial yang lahir bersamaan dengan hadirnya sumber kekuasaan baru.⁷ Di Indonesia sendiri di masa itu, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya telah berkembang menjadi kota besar pusat modernisasi pada abad ke 20, kemudian disusul oleh Semarang, Medan, dan Makassar.⁸ Pertumbuhan dan perkembangan kota akan selalu sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduknya.⁹ Laju pertumbuhan penduduk Makassar semakin besar dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk di provinsi. Hal ini terbukti pada 1971 hingga 1980, dimana laju pertumbuhan Makassar mencapai 5,52% sementara untuk provinsi hanya 2,9%.¹⁰

Kemajuan sebuah kota akan selalu memunculkan permasalahan sosial seperti kemiskinan dan tuntutan-tuntutan terhadap pelayanan pendidikan serta kesehatan.¹¹ Untuk itu, setiap walikota yang menjabat haruslah memiliki cara atau kebijakan-kebijakan tersendiri dalam mengatasi setiap persoalan yang muncul dalam proses

⁷ Dias Pradadimara, “*Dari Makassar ke Makassar: Aspek Demografi dan Politik Proses Etnisasi Sebuah Kota*, Populasi Vol.14 (1),2003, hlm. 81.

⁸ Freek Colombijn dkk., *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 28.

⁹ Dias Pradadimara, *Op. Cit.*, hlm. 80. Di Makassar, jumlah penduduk pada abad ke-19 hanya berada pada kisaran 20 ribuan saja. Namun pada abad ke-20, tepatnya setelah penaklukan penguasa lokal di Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (1905-1906), jumlah penduduknya terus bertambah. Tahun 1905 jumlah penduduk diperkirakan mencapai 26 ribu orang hingga pada 1930 menurut sensus, penduduk mencapai lebih dari 84 ribu orang. Makassar lalu menjadi kota besar kedua di luar Jawa setelah Palembang.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

¹¹ Ilham Daeng Makkelo, “Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis,” *Jurnal of Cultural Sciences*, Vol.12 (2), 2017, hlm. 88.

pembangunannya. Seperti halnya Kota Ujung Pandang pada masa pemerintahan Abustam (1978-1983) yang mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pembangunan kota, salah satunya ialah seperti pembangunan di kawasan pinggiran kota.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk merancang penelitian terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Abustam sebagai walikota di Ujung Pandang, dengan judul **“Abustam Sebagai Walikota Kotamadya Ujung Pandang (1978-1983).”**

1.2 BATASAN MASALAH

Penelitian skripsi ini berjudul **“Abustam Sebagai Walikota Kotamadya Ujung Pandang (1978-1983).”** Sehingga, fokus penelitian dan penulisan sejarah dalam skripsi ini ialah tokoh Abustam sebagai Walikota Ujung Pandang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi penelitian dengan dua batasan agar pembahasan dapat terfokus, yakni batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial pada penelitian ini adalah Kotamadya Ujung Pandang (Makassar) dengan batasan temporal dari tahun 1978-1983. Dengan pertimbangan pada tahun 1978, Abustam resmi dilantik sebagai walikota setelah berakhirnya masa jabatan H.M. Daeng Patompo dan kemudian berakhir pada 1983, sesuai dengan masa berakhirnya jabatan Abustam sebagai walikota.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka penulisan skripsi ini merumuskan persoalan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat hidup dan perjalanan karir Abustam dalam politik serta pemerintahan sebagai Walikota Ujung Pandang 1978-1983?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kebijakan yang diterapkan Abustam dalam pembangunan Kotamadya Ujung Pandang? Tantangan apa yang dihadapinya dalam pembangunan Kotamadya Ujung Pandang pada 1978-1983?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui riwayat hidup dan perjalanan karir Abustam dalam politik serta pemerintahan sebagai Walikota Ujung Pandang 1978-1983.
 - b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kebijakan yang diterapkan Abustam dalam pembangunan Kotamadya Ujung Pandang serta mengetahui pula mengenai tantangan yang dihadapinya dalam pembangunan Kotamadya Ujung Pandang pada 1978-1983.
2. Manfaat Penelitian:
 - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

- b. Sebagai literatur bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya terutama mengenai sejarah kota ataupun tentang sejarah walikota.
- c. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan, sehingga bermanfaat dalam menambah saran informasi kesejarahan terutama di Kota Makassar.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tahap penyusunan skripsi, penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber yang berkaitan dengan perkembangan kota pada 1978-1983. Sumber-sumber yang dikumpulkan berupa buku, jurnal-jurnal, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Adapun beberapa buku yang penulis gunakan yakni *Pengantar Sejarah Kota*. Buku ini ditulis oleh Purnawan Basundoro yang menjelaskan tentang kota dan dinamika kota dari waktu ke waktu. Tulisan ini membahas kota-kota di dunia pada periode awal kemudian berlanjut ke kota tradisional hingga menuju kota kolonial. Hal yang dibahas tentang permasalahan di kota-kota terutama urbanisasi yang meningkat dan kondisi pemukiman dalam kota yang menjadi masalah utama di kawasan perkotaan. Selain itu, tulisan ini juga menguraikan perkembangan pemerintahan kota, seperti administrasi *gemeente*, pemerintah kota pada masa Jepang dan masa kemerdekaan Indonesia.

Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan. Penyunting dari buku ini yakni Dias Pradadimara dan Muslimin A.R Effendy. Buku ini membahas

keadaan penduduk kota mulai dari abad 17 sampai pada abad ke 20. Buku ini lebih fokus membahas tentang kondisi Makassar seperti penyebab bertambahnya penduduk di kota Makassar yang menyebabkan Makassar sebagai ibukota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami ruang gerak yang terbatas. Salah satu penyebab bertambahnya penduduk Makassar yakni adanya migrasi dari pedalaman Sulawesi Selatan. Akibatnya terjadi perubahan dibidang politik kota Makassar.

Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis. Jurnal ini ditulis oleh Ilham Daeng Makkelo. Tulisan ini memuat tentang sejarah perkotaan, mulai dari kota prasejarah, kota tradisional dan kota modern. Kota- kota di Indonesia semakin memperlihatkan perkembangannya pada abad ke-20. Di Makassar sendiri, ruang kota yang digunakan tampil dengan simbol modern. Salah satu ciri kota modern yakni pemukiman Makassar dibagi berdasarkan kelas sosialnya. Semakin modern sebuah kota maka tingkat penduduknya akan turut meningkat. Karenanya dapat dikatan bahwa perkembangan sebuah kota sejalan dengan munculnya permasalahan- permasalahan umum dalam sebuah kota. Misalnya pemukiman yang semakin sempit yang mengakibatkan aktivitas semakin terbatas serta banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi. Tulisan ini juga memberikan informasi tentang perencanaan-perencanaan sebuah kota seperti administrasi kota, pembentukan perumahan, bahkan perubahan dalam segi ekonomi, politik dan sosial budaya.

Walikota Makassar Legenda di Timur: Persembahan 44 Tahun Kota Makassar. Penyunting Nuraeni Ma'mur dan Bachtiar Adnan Kusuma. Buku ini

memuat beberapa walikota di Makassar dengan ciri-ciri kepemimpinan setiap walikota serta menjelaskan tentang segala program kerja yang pernah dirancang masing-masing walikota ketika masa pemerintahannya. Hal lain yang dijelaskan yakni bentuk kebijakan yang digunakan serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam masing-masing walikota dalam mengadakan pembangunan selama menjabat. Penjelasan yang lainnya yang tidak kalah penting yakni mengenai sejarah singkat makassar terutama latar belakang penyebab nama Makassar mengalami pergantian menjadi Ujung Pandang pada tahun 1971.

H.M. Dg. Patompo, Biografi Perjuangan. Buku yang ditulis oleh Abdurrazaq Mattaliu ini bukan hanya membahas tentang Daeng Patompo sebagai walikota, tetapi juga sedikit membahas mengenai walikota Abustam. Buku ini membahas mengenai cara kepemimpinan Abustam yang dikenal dengan gaya tradisional serta pola pembangunan yang diterapkan dan sasaran utama dalam pembangunan. Informasi dalam buku biografi perjuangan ini, dapat membantu penulis melihat cara yang diterapkan setiap walikota dalam melakukan pembangunan.

Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia. Buku ini berisi mengenai kumpulan tulisan tentang sejarah kota-kota di Indonesia, terutama sejarah kota pada abad ke 20 yang mengalami perkembangan pesat dengan gaya modern. Kota-kota yang berkembang pada masa itu yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Medan serta Makassar. Selain dari perkembangan setiap kota buku ini membahas permasalahan umum yang dialami setiap kota yakni masalah

kependudukan. Pesatnya peningkatan dalam sebuah kota mengakibatkan pemukiman menjadi semakin padat. Hal lain yang kerap terjadi maraknya kriminalitas yang diakibatkan kurangnya lapangan kerja sedangkan penduduk semakin meningkat.

1.6 METODE PENELITIAN

Dalam menjawab permasalahan yang sebelumnya telah dikemukakan dalam rumusan masalah, maka menulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari lima bagian, yakni pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber/verifikasi, interpretasi/penafsiran dan penulisan sejarah.

Dalam memilih topik harus berdasarkan topik sejarah. Dengan adanya pemilihan topik, maka penulis dapat menetapkan batasan geografis yang nantinya akan diteliti. Batasan geografis dalam hal ini seperti, daerah mana yang akan menjadi objek penelitian dan batasan waktu yang akan penulis gunakan. Pemilihan topik dapat dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dengan adanya kedekatan emosional, dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan sumber yang dibutuhkan.¹²

Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan sumber. Pada tahap ini, pengumpulan sumber berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mencari beberapa referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti buku, jurnal, skripsi dan arsip. Penulis mengumpulkan sumber berupa buku dari perpustakaan umum Universitas Hasanuddin dan perpustakaan multimedia. Selanjutnya, penulis

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 71.

mengumpulkan beberapa skripsi dari perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, sebagai sumber tambahan serta jurnal dari laman web. Penulis juga mengumpulkan sumber arsip dari badan arsip dan perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta melalui sejarah lisan.

Sejarah lisan memberikan kesempatan bersuara secara umum, bukan hanya dari kalangan atas, tapi juga dari kalangan bawah. Dengan adanya sejarah lisan ini, maka sejarah sosial dapat berkembang dengan membahas sejarah masyarakat secara keseluruhan.¹³ Sejarah lisan dengan menggunakan metode wawancara dapat membantu menambah pengadaan sumber dan terutama dalam hal memperkaya penulisan (sejarah) secara nyata.¹⁴ Hal yang tidak kalah penting ialah dengan adanya sejarah lisan, maka memungkinkan untuk perluasan permasalahan sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi dengan dokumen tertulis (informasi yang tidak terdapat di dokumen dapat dicari melalui sejarah lisan).¹⁵ Sejarah lisan dalam hal ini wawancara, terutama dalam penulisan biografi, sangat berperan penting. Hal ini dikarenakan wawancara dalam penulisan biografi dapat menampilkan bentuk lain, dari sudut pandang kesejarahannya, dengan dapat memperlihatkan pelaku-pelaku sejarah di tengah-tengah masyarakat dan zamannya.

¹³ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2020), hlm. 68.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 27.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

Mengingat bahwa judul dari penelitian penulis sebagian akan membahas tentang biografi, maka sudah tentu sejarah lisan sangatlah dibutuhkan. Sehingga, dalam penelitian ini akan melibatkan pula beberapa anggota masyarakat sebagai narasumber yang mengalami masa kepemimpinan walikota Abustam.

Adapun narasumber yang telah penulis wawancarai yakni Safrullah Sanre yang bertempat tinggal di jalan Cendrawasih 3, tepatnya di kompleks Patompo. Kemudian narasumber kedua yaitu Aliamin yang bertempat tinggal di Jl. Ujung Pandang, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang. Tepatnya di samping Benteng Rotterdam. Selain wawancara, beberapa sumber arsip yang penulis kumpulkan yakni:

- Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Volume I Tahun 1926-1988 No. Reg. 2176 yang membahas tentang masalah pengembangan perkotaan oleh Abustam selaku ketua umum BKS AKSI.
- Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Volume I Tahun 1926-1988 No. Reg 2169 buku yang membahas tentang 2169 keputusan – keputusan rapat kerja koordinasi perencanaan pembangunan tahun 1980/1981 oleh pemerintah Kotamadya Ujungpandang. Tgl 12s/d 17 Mei 1980.
- Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Volume I Tahun 1926-1988 No. Reg 2111 makalah 1981 oleh Abustam mengenai kebijaksanaan masalah pembangunan.

- Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Volume I Tahun 1926-1988 No. Reg 1543 membahas tentang walikotamadya Ujungpandang: Diklat masalah pengembangan perkotaan 1982.
- Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Volume I Tahun 1926-1988 No. Reg 1546 tentang beberapa rencana kotayang tertera dalam laporan tahun 1982.
- Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Volume I Tahun 1926-1988 No. Reg. 2196 membahas tentang laporan pertanggungjawaban walikota kotamadya Kepala Daerah TK II dari tahun 1979-1981 termasuk didalamnya kebijakan dan hambatan dalam pembangunan kota Makassar.
- Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Volume I tahun 1926-1988 No. Reg. 587 mengenai surat keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia (pemberhentian Abustam dan pengangkatan Jancy Raib).
- Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Volume I tahun 1926-1988 No. Reg. 847 mengenai calon DPRD tahun 1977.

Tahap ketiga yaitu kritik sumber/verifikasi. Apabila sumber telah terkumpul, maka penulis akan mencari kebenaran dari sumber yang telah terkumpul melalui kritik sumber. Pada tahap ini terdapat dua kritik sumber yaitu kritik intern (dalam) dan kritik ekstern (luar). Kritik intern bertujuan untuk mengetahui maksud dari dokumen yang akan digunakan serta mengetahui keasliannya. Sedangkan kritik ekstern bertujuan untuk membandingkan sumber yang telah ada. Contohnya ialah

sumber wawancara. Dengan adanya perbandingan sumber, maka penulis dapat mengetahui kebenaran dari sumber-sumber temuan. Selanjutnya yaitu tahap interpretasi atau penafsiran data, sumber yang diperoleh kemudian diseleksi penempatannya. Untuk mengetahui data mana yang akan digunakan dan untuk mengetahui yang mana data sumber primer dan sekunder. Tahap terakhir yaitu penulisan sejarah. Pada tahap ini, data-data atau sumber yang telah ada kemudian disusun secara sistematis dengan topik yang jelas sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran sesuai yang diharapkan, maka perlu ada pembahasan dalam setiap bab. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang berkaitan.

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang gambaran umum kotamadya Ujung Pandang.

Bab III membahas tentang riwayat hidup dan perjalanan karir Abustam dalam politik serta pemerintahan sebagai Walikota Ujung Pandang 1978-1983.

Bab IV membahas tentang kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan serta tantangan yang dihadapi Abustam dalam pembangunan Kotamadya Ujung Pandang tahun 1978-1983.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran dari Bab I hingga IV. Kesimpulan inilah yang nantinya menjadi jawaban dari segala permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 SEJARAH SINGKAT KOTA MAKASSAR

Tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya di Sulawesi Selatan, Makassar juga memiliki sejarah yang panjang. Mulanya Makassar merupakan wilayah yang dikenal dengan kerajaan maritim sebab memiliki pelabuhan perdagangan besar yang memanjang dari muara sungai Jeneberang dan muara sungai Tallo. Pelabuhan ini dikenal dengan pelabuhan bebas kerajaan kembar Gowa Tallo. Pada awal abad ke-17 ketika Makassar mulai dijadikan pusat perdagangan oleh Negara Eropa dan Cina, VOC justru memulai peperangan untuk mengambil alih Makassar. Tepat tanggal 18 November 1667 VOC yang dipimpin oleh Cornelis Janszoon Speelman berhasil mengalahkan kerajaan Gowa Tallo, ditandai dengan adanya sebuah perjanjian yang disebut perjanjian Bungaya.

Jatuhnya kerajaan Gowa –Tallo ke tangan VOC menandakan babak baru perkembangan kota Makassar. Pusat kota yang awalnya berada di Benteng Somba Opu kemudian dipindahkan ke Benteng Rotterdam. Setelah perpidahan ini, Speelman menata Makassar menjadi beberapa bagian, dimana pusat pemerintahan ditempatkan di Benteng Rotterdam, pemukiman-pemukiman baru banyak tumbuh dan berkembang. Disebelah timur laut benteng Rotterdam terdapat perkampungan pedagang yang dihuni oleh pedagang Eropa, Tionghoa dan orang asli beragama Kristen, disebelah utara Benteng Rotterdam terdapat perkampungan Melayu dan disebelah Selatan Benteng Rotterdam terdapat kampung baru yang dihuni orang

Asia. Dari benteng Rotterdam inilah Makassar tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kota.¹⁶

Pada abad ke-20 Indonesia semakin memperlihatkan perkembangan kemodernannya setelah kota-kota besar di Indonesia diubah statusnya menjadi *Gemeente*.¹⁷ Penduduk yang bermukim di kota-kota *gemeente* ini lebih banyak dihuni oleh orang Belanda.¹⁸ Makassar sendiri dikukuhkan menjadi daerah otonom yang diberi nama *Gemeente van Makassar* pada 12 Maret 1906 dan resmi digunakan pada 1 April 1906.¹⁹

Setelah Makassar resmi menjadi kota *Gemeente*, maka dibentuklah Dewan kota (*Gemeenteraad*), dengan jumlah 13 orang yang berasal Belanda, pribumi dan Timur Asing. Pada tahun 1916, dewan kota mengusulkan adanya perubahan dalam struktur pemerintahan, hal ini kemudian di setujui oleh Gubernur Jendral. Adanya perubahan dalam struktur pemerintahan kota ini kemudian menghadirkan

¹⁶Asmunandar, "Re-identitas kota lama Makassar", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, Vol. 15 (1), 2020, hlm. 2-3.

¹⁷ Gemeente merupakan suatu istilah dalam Bahasa Belanda yang berarti kotamadya. Pada masa pemerintahan Belanda gemeente dipimpin oleh burgemeester atau walikota.

¹⁸ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 85.

¹⁹ Andi Mulya Sultani, *Perkembangan Kotamadya Ujung Pandang 1971 - 1999*: (Makassar: Skripsi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, 2007), hlm.22.

walikota Makassar untuk pertama kalinya pada tahun 1918.²⁰ Walikota pertama Makassar bernama J.E. Dambrik yang memerintah dari tahun 1918 sampai 1927.²¹

Dalam kurun waktu tahun 1930-an hingga tahun 1942 Makassar berkembang pesat menjadi kota pelabuhan, kota dagang, pendidikan, pusat militer Belanda, pembangunan kantor pelayaran, hotel, bioskop, Bank, gudang rumah dan toko-toko. Pembangunan ini tidak hanya diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda, namun juga terdapat campur tangan dari pihak swasta seperti pembangunan bioskop dan hotel.²²

Pada 9 februari 1942, Jepang berhasil menduduki Indonesia yang sebelumnya berada dibawah kekuasaan kolonial. Untuk menduduki wilayah Makassar pasukan Jepang terlebih dahulu mendarat di Malino dan sebagian lagi di Australia.²³ Setelah penguasaan Jepang, segala sesuatu yang berkaitan dengan Belanda dihilangkan. Bahasa Belanda dilarang untuk digunakan serta buku-buku pelajaran yang didalamnya berbahasa Belanda pun tidak boleh digunakan.

²⁰ Dias Pradadimara. “*Dari Makassar ke Makassar: Proses Etnisasi Sebuah Kota*” Dalam Dias Pradadimara, Muslimin A.R Effendy (penyunting). *Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 188.

²¹ Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Inventaris Arsip Kotamadya Ujung Pandang II 1951-1987*, (Makassar, 2012), hlm. 1.

²² Ningrum Pangestu, *Politik Representasi Dan Simbolisme Perkotaan: Monumen di Kota Makassar 1930-1945*: (Makassar: Skripsi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, 2015), hlm.37-38.

²³ Abu Hamid, dkk, *perkampungan di perkotaan sebagai wujud protes adaptasi sosial: kehidupan di perkampungan miskin kotamadya Ujungt Pandang*, (Makassar: Direktorat Jenderal kebudayaan direktorat sejarah dan nilai tradisional proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah 1982/1983), hlm 21.

Penjajahan Jepang hanya terhitung dengan waktu yang singkat sekitar tiga setengah tahun, tetapi membawa banyak perubahan bagi Indonesia.²⁴

Dalam hal pemerintahan dan pembangun, fokus utama Jepang lebih mengarah kepada strategi perang. Rakyat diarahkan untuk membantu persediaan pangan yang menunjang perang tanpa adanya program kesejahteraan rakyat.²⁵ Upaya ini menjadi penopang dalam perbaikan ekonomi Indonesia yang nantinya akan digunakan dalam perang Jepang serta rencana terhadap dominasi ekonomi dalam jangka Panjang bagi Asia Timur dan Tenggara.²⁶

Ketika Negara Republik Indonesia telah merdeka, kekacauan bukan lagi disebabkan oleh bangsa Asing tetapi bangsa Indonesia sendiri. Di Sulawesi Selatan kekacauan yang terjadi mengakibatkan kurangnya kemajuan dalam pengembangan kota Makassar. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dan pemeritah provinsi untuk pembangunan, dialihkan untuk membiayai keamanan dan ketertiban penduduk akibat adanya pemberontakan dari Pasukan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Barulah setelah tahun 1965 usaha pengembangan dan penataan administrasi kota Makassar mulai digiatan kembali.²⁷

²⁴ Purnawan Basundoro, *op.cit.* hlm 90-91.

²⁵ Abu Hamid, *Loc.Cit.*

²⁶ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm.424.

²⁷ Andi Mulya Sultani, *op.cit.*, hlm. 23-25.

2.2 POSISI KOTA MAKASSAR SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN

Terbentuknya Provinsi Sulawesi yang disusul pembentukan badan pemerintahan, menempatkan Makassar sebagai pusat pemerintahan dan politik. Sulawesi merupakan salah satu dari delapan provinsi yang dibentuk pada rapat PPKI tahun 1945. Provinsi lain yang ikut terbentuk yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra, Kalimantan, Sunda kecil dan Maluku.

Kegiatan pemerintahan diawali dengan terpilihnya Dr. Sam Ratulangi sebagai gubernur provinsi Sulawesi.²⁸ Namun dalam pemerintahannya, Dr. Sam Ratulangi mengalami hambatan dengan munculnya tentara Sekutu dan tentara Belanda NICA. Setelah NICA menguasai Makassar Dr. Sam Ratulangi ditangkap dan dibuang ke Serui Bersama dengan beberapa tokoh politik lainnya. Makassar kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan NICA. Setelah berkuasa, NICA kembali menghidupkan kekuasaan Belanda dengan negara-negara kecil yang kemudian dijadikan sebagai satu negara yang dinamakan Negara Indonesia Timur.²⁹

Sepanjang tahun 1950-an terjadi banyak pergolakan politik untuk menghilangkan NIT³⁰. Saat itu NIT dianggap sebagai salah satu usaha Belanda

²⁸ Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Sejarah perkembangan pemerintahan departemen dalam negeri di propinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang, 1991), hlm.400.

²⁹ Ilham Ambo Tang, *menolak kolonialisme. Menonton film barat di kota Makassar tahun 1950-an*, (Makassar: skripsi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 8.

³⁰ Negara Indonesia Timur dibentuk setelah dilaksanakannya Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar tanggal 7-24 Desember 1946. Awalnya negara ini dinamakan Negara Indonesia Raya dan berganti nama pada 27 Desember 1946 dengan nama Negara Indonesia Timur.

untuk kembali berkuasa di Indonesia.³¹ Pada tahun 1950 banyak dari masyarakat Makassar mendukung adanya pembentukan negara kesatuan. Disisi lain terdapat pihak yang ingin mempertahankan NIT seperti bekas tentara KNIL yang dipimpin Andi Azis. Andi Azis melakukan pemberontakan melawan APRIS yang dikirim dari Jawa dan menang dalam pemberontakan tersebut. Tindakan ini dianggap melawan hukum, hingga pemerintah menumpas pasukan Andi Azis.³²

Setelah NIT berhasil diburbarkan pada 1950, kondisi Makassar tidak serta merta langsung aman, KNIL yang merupakan bekas tentara kolonial masih sering melakukan pemberontakan di daerah pinggiran³³ Pada 8 Agustus 1950 dilapangan terbang Mandai dibuat kesepakatan antara APRIS yang diwakili oleh Kolonel Kawilarang dan Mayor Jendral Scheffelaar sebagai wakil Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia. Hasil dari kesepakatan tersebut ialah seluruh anggota pasukan KNIL meninggalkan Makassar dan menyerahkan seluruh perlengkapannya kepada APRIS.

Setelah kemerdekaan, ruang dalam kota Makassar belum sepenuhnya aman untuk beraktivitas. Pada tahun 1953-1965 muncul pemberontakan dari DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Awalnya mereka mengorganisasi diri dalam Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan atau KGSS, kemudian berubah menjadi Corps Tjadangan Nasional (CTN), kemudian Tentara Keamanan Rakyat

³¹ Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay, "*Pengantar Historiografis*", dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay (Penyunting), *Negara dan Masyarakat di Sulawesi Selatan di Tahun-Tahun 1950-an*. (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm.5.

³² Ilham Ambo Tang, *op.cit*, hlm.9.

³³ Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay, *Loc.cit*.

(TKR) dan akhirnya menjadi Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pada tahun 1957 muncul juga kekacauan yang disebabkan oleh Permesta. Hal ini menambah semakin kacanya kondisi sosial politik dan ekonomi.³⁴

Dibalik kekacauan yang masih terjadi dari DI/TII dan Permesta, pemerintah tetap memperhatikan Makassar dengan menata wilayahnya menjadi beberapa bagian. Pada tahun 1957 dikeluarkan UU No. 9 Tahun 1957 tentang ruang pokok pemerintahan. Dari UU tersebut Makassar dibagi menjadi enam kecamatan yakni Makassar, Ujung Pandang, Wajo. Ujung Tana, Bontoala dan Mariso. Dua tahun setelahnya tepat pada 1959 kecamatan kembali ditambah menjadi dua yaitu kecamatan Mamajang dan Tallo.³⁵

Meskipun telah dilakukan penataan dalam ruang kota, tetapi mengingat Makassar yang merupakan pusat kota dimana segala aktivitas dilakukan di dalamnya serta penduduknya yang semakin tahun terus bertambah mengakibatkan wilayahnya menjadi semakin sempit. Karenanya pemerintah perlu untuk melakukan perluasan wilayah. Dengan adanya perluasan wilayah ini maka nama Makassar ikut diganti. Adapun maksud dari perubahan nama tersebut berdasar atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Makassar pada 24 September 1964 no. 29/DPRD-GR/64, yang menetapkan pergantian nama menjadi Ujung Pandang. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa Ujung Pandang merupakan nama yang digunakan oleh pahlawan Sultan Hasanuddin, nama Makassar merupakan nama yang diberikan oleh penjajah Portugis dan Belanda

³⁴ Ilham Ambo Tang, *Op.cit.*, hlm. 10-15.

³⁵ *Ibid.*, hlm.5.

dan pada umumnya penduduk Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum banyak mengenal Makassar dengan sebutan Juppandang. Wilayah Makassar akhirnya dapat diperluas pada tahun 1971.³⁶

Melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971, diadakan perubahan terhadap batas-batas daerah Makassar dengan melakukan penambahan wilayah dari kabupaten-kabupaten disekitarnya untuk dimasukkan kedalam wilayah kota Makassar. Terdapat tiga kabupaten yang sebagian wilayahnya dimasukkan kedalam kota Makassar yakni Kabupaten Gowa meliputi (Barombong, Karuwisi, Panaikang, Tello Baru, Antang, Tamangappa, Jongaya, Rappocini, Maccini Sombala, Mangasa), kemudian Kabupaten Maros meliputi (Bira, Daya, Tamalanrea, Bulurokeng, Sudiang), dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi (Barrang Caddi, Barang Lompo dan Kodingareng). Dengan adanya perluasan wilayah ini, maka nama Makassar juga ikut diubah menjadi Ujung Pandang.³⁷ Rencana perluasan yang telah mendapat persetujuan tertuang dalam surat keputusan masing -masing kabupaten:

- Surat keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tanggal 14 April 1971, Nomor 1/ DPRD/ 1971.
- Surat keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros tanggal 13 April 1971, Nomor 5/ Kpts/ DPRD/IV/1971.

³⁶ Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Op.cit.*, hlm. 513.

³⁷ M. Dg. Patompo, *Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan Fragmen Revolusi Pembangunan*, (Makassar: Percetakan SMP FRATER Ujung Pandang, 1976), hlm. 132-137.

- Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 14 April 1971, Nomor 07/ DPRD/ 1971.³⁸

Makassar yang sebelumnya hanya memiliki luas wilayah 25 Km² kemudian berkembang menjadi 175 Km².³⁹ Alasan lain dari penggantian nama Makassar menjadi Ujung Pandang yang jarang diketahui ialah masa itu penduduk Gowa banyak yang berasal dari suku Makassar, kabupaten Maros dan Pangkep pun penduduknya sebagian dari suku Bugis dan sebagian lagi dari suku Makassar.⁴⁰

Tepat pada 13 September 1971 bertempat di Operation Room Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Menteri Dalam Negeri meresmikan perluasan wilayah kotamadya Makassar dan sekaligus meresmikan perubahan nama menjadi Kotamadya Ujung Pandang.⁴¹ Dengan perluasan wilayah Kota Makassar, maka batas-batas wilayahnya pun turut berubah, dimana sebelah utara berbatasan dengan kabupaten pangkajene dan kepulauan serta kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Maros dan

³⁸ [Http://Nurkasim49.blogspot.co.id/2011/12/Sejarah Kota Makassar.html](http://Nurkasim49.blogspot.co.id/2011/12/Sejarah_Kota_Makassar.html) di unduh pada tanggal 7 Desember 2021.

³⁹ Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Loc.cit.*

⁴⁰ Abu Hamid, dkk, perkampungan di perkotaan sebagai wujud protes adaptasi sosial: kehidupan di perkampungan miskin kotamadya Ujungt Pandang, (Makasaar: Direktorat Jenderal kebudayaan direktorat sejarah dan nilai tradisional proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah 1982/1983), hlm. 14-15.

⁴¹ Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Loc.cit.*

kabupaten Gowa sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.⁴²

Sebelum diperluas kecamatan di kotamadya Ujung Pandang hanya berjumlah 8 kecamatan dengan 44 desa. Setelah adanya perluasan, kecamatan bertambah menjadi 11 buah dengan 62 desa, 453 RK dan 3.290 RT. Kecamatan yang ada setelah diperluasnya wilayah yakni kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Panakukang, Tamalate dan Biringkanaya.

Tabel: 2.2.1 Jumlah kecamatan setelah diperluasnya wilayah kotamadya Ujung Pandang 1971.⁴³

| No | Kecamatan | Luas wilayah | Jumlah Kelurahan |
|----|---------------|--------------|------------------|
| 1. | Mariso | 178 Ha | 6 kelurahan |
| 2 | Mamajang | 215 Ha | 5 kelurahan |
| 3 | Makassar | 276 Ha | 5 kelurahan |
| 4 | Ujung Pandang | 238,4 Ha | 5 kelurahan |
| 5 | Wajo | 183,6 Ha | 4 kelurahan |
| 6 | Bontoala | 158 Ha | 7 kelurahan |
| 7 | Tallo | 592 Ha | 7 kelurahan |
| 8 | Ujung Tanah | 240 Ha | 8 kelurahan |
| 9 | Panakukang | 2.920 Ha | 5 kelurahan |
| 10 | Tamalate | 2.384 Ha | 5 kelurahan |
| 11 | Biringkanaya | 4.38 Ha | 5 kelurahan |

⁴² Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, op.cit., hlm. 3.

⁴³ Abu Hamid, Loc.cit.

2.3 PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Dalam proses pembangunan kota, pertumbuhan penduduk merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Kotamadya Ujung Pandang sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai pusat administrasi tiap tahunnya mengalami lonjakan jumlah penduduk. Bahkan ketika masih dibawah kekuasaan Belanda kota ini sudah diminati oleh banyak penduduk asing karena dikenal sebagai pusat perdagangan. Hal ini mengakibatkan banyak warga asing berbondong-bondong masuk ke Makassar yang membuat jumlah penduduk semakin meningkat.

Memasuki abad ke- 20 Kota Makassar semakin memperlihatkan perkembangannya. Pada tahun 1905 jumlah penduduk di kota Makassar sekitar 26 ribu orang, dan tiap tahunnya meningkat. Hingga pada tahun 1930 menurut data dari sensus penduduk jumlahnya mencapai sekitar 84 ribu orang.⁴⁴ Kemudian tahun 1930-1961 jumlah penduduk meningkat dari 90.000 jiwa kemudian meningkat bahkan hampir mencapai 400.000 jiwa.

Jumlah penduduk semakin bertambah ketika terjadi pemberontakan DI/TII yang mengakibatkan penduduk dari pedalaman mencari perlindungan ke kota. Pada tahun 1971 jumlah penduduk mencapai 434.168, tahun 1976 mencapai 602.693, tahun 1978 mencapai 602.916, tahun 1979 mencapai 623.985, tahun 1980 mencapai 708.465, tahun 1981 mencapai 712.219, tahun 1982 mencapai 717.585. Tiap tahunnya jumlah penduduk di kotamadya Ujung Pandang semakin

⁴⁴ Dias Pradadimara. “*Dari Makassar ke Makassar: Proses Etnisasi Sebuah Kota*” Dalam Dias Pradadimara, Muslimin A.R Effendy (penyunting). *Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 185-186.

bertambah. Bahkan pada tahun 1999 jumlah penduduk mencapai 1.191.456.⁴⁵ Presentase laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1961/ 1971 sebanyak 1, 26%, kemudian dari tahun 1971/ 1980 sebanyak 5,52%.⁴⁶ Peningkatan ini disebabkan oleh adanya gelombang migrasi yang terjadi sebanyak dua kali. Gelombang pertama akibat posisi sosial dan politik Kota Makassar yang sangat penting di Indonesia Bagian Timur, gelombang kedua migrasi akibat adanya ketidakamanan di daerah pedesaan Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh DI/TII. Dibanding dengan gelombang migrasi pertama, migrasi kedua jumlahnya lebih banyak.⁴⁷

Tabel 2.3.1 Perkembangan penduduk Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1971 menurut data statistik pada tahun 1980.

| No | Kecamatan | Penduduk | | | | |
|----|---------------|----------|--------|--------|---------|---------|
| | | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
| 1 | Mariso | 46.717 | 47.216 | 47.838 | 52.685 | 52.446 |
| 2 | Mamajang | 66.451 | 66.523 | 69.823 | 71.260 | 71.560 |
| 3 | Makassar | 90.746 | 91.324 | 92.074 | 102.973 | 103.197 |
| 4 | Ujung Pandang | 48.364 | 45.764 | 44.562 | 44.102 | 43.419 |
| 5 | Wajo | 52.998 | 52.967 | 53.113 | 49.186 | 49.251 |
| 6 | Bontoala | 67.563 | 67.553 | 67.528 | 68.073 | 68.072 |
| 7 | Tallo | 55.673 | 57.745 | 60.670 | 78.193 | 79.826 |
| 8 | Ujung Tanah | 37.576 | 37.474 | 37.864 | 42.514 | 43.170 |
| 9 | Panakukang | 45.809 | 47.286 | 50.141 | 68.022 | 69.246 |

⁴⁵ Andi Mulya Sultani, *op.cit.* hlm.28

⁴⁶ Abu Hamid, *op.cit.* hlm. 39

⁴⁷ Dias Pradadimara, *Penduduk Kota, Warga Kota, Sejarah Kota: Kisah Makassar*, dalam Freek Colombijn, Martine Barwegen, Purnawan Basundoro, Johny Alfian Khusairy (Penyunting), *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. (Yogyakarta: Ombak,2019), hlm.246.

| | | | | | | |
|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10 | Tamalate | 61.776 | 62.342 | 72.542 | 99.502 | 99.197 |
| 11 | Biringkanaya | 29.050 | 26.722 | 27.824 | 31.655 | 32.840 |
| Jumlah | | 602.422 | 602.916 | 623.985 | 708.165 | 712.224 |

(Sumber: BPS dalam buku perkampungan di perkotaan sebagai wujud protes adaptasi sosial: kehidupan di perkampungan miskin kotamadya Ujung Pandang).

Melihat dari banyaknya jumlah penduduk kotamadya Ujung Pandang, dapat dipastikan bahwa penduduknya berasal beberapa suku di Sulawesi Selatan dan suku lain di luar Sulawesi. Suku yang ada di Kotamadya Ujung Pandang masa itu yakni Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Suku lain di luar Sulawesi Selatan yaitu Ambon, Timor, Bima, Buton dan bahkan Cina. Banyaknya suku yang ada membuat keanekaragaman dalam kota semakin tinggi. Dari banyaknya suku yang mendiami Makassar, suku dengan jumlah penduduk yang paling banyak ialah suku Makassar dan suku Bugis.⁴⁸

Penggolongan penduduk menurut sukunya dapat terlihat dari mayoritas penduduk dalam sebuah kecamatan, seperti di kecamatan Mamajang, Ujung Pandang, Panakukang, Tamalate, Biringkanaya mayoritas dihuni oleh suku Makassar sedangkan di kecamatan Mariso, Makassar, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah mayoritas dihuni suku Bugis.⁴⁹

⁴⁸ Abu Hamid, dkk, *perkampungan di perkotaan sebagai wujud protes adaptasi sosial: kehidupan di perkampungan miskin kotamadya UjungPandang*, (Makassar: Direktorat Jenderal kebudayaan direktorat sejarah dan nilai tradisional proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah 1982/1983), hlm 39-40.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.48-49.

Kesejahteraan masyarakat tidak akan luput dari jumlah penduduk dan fasilitas didalamnya. Pada tahun 1980 jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 592.679 orang, Khatolik 21.967 orang, Protestan 63.883 orang, Hindu 2.132 orang dan Buddha sebanyak 24.016 orang. Karenanya rumah-rumah ibadah haruslah diperbanyak. Terhitung saat itu rumah ibadah Islam sebanyak 346 buah, Khatolik 11 buah, Protestan 75 buah, Hindu 2 buah dan Buddha 5 buah.⁵⁰

2.4 KONDISI EKONOMI

Perkembangan ekonomi masyarakat dalam kota Makassar dapat dilihat dari lapangan usaha yang ada. Mata pencaharian masyarakat umumnya menjadi petani, nelayan, pelayaran dan perdagangan. Bahkan masyarakat Makassar pada masa Hindia Belanda sudah bekerja diperusahaan Belanda sebuah kontraktor perkebunan dan pedagang industri.⁵¹

Sejak tahun 1938 secara administratif Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Indonesia Timur.⁵² Pada masa ini perkembangan ekonomi Makassar semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena ditetapkannya Makassar sebagai pusat kegiatan pada masa pemerintahan Belanda untuk wilayah Indonesia Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelabuhan Makassar semakin banyak dikunjungi oleh kapal-kapal asing. Peningkatan ini terlihat dari banyaknya kegiatan ekspor komoditas yang dilakukan di pelabuhan Makassar, seperti ekspor

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 79.

⁵¹ Ilham Ambo Tang, “*Menolak Kolonialisme. Menonton Film Barat di Kota Makassar Tahun 1950-an*”, (Makassar: Skripsi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, 2014) Hlm. 16.

⁵² Barbara Sillars Harvey, *Pemberotakan Kahar Muzakkar dari tradisi ke DI/TII*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 329.

komoditas Kopra.⁵³ Tercatat sekitar 90 persen kopra yang berasal dari Kawasan Indonesia Timur yang diekspor dari pelabuhan Makassar.

Ketika masa pemerintahan Belanda, Makassar menjadi bandar niaga yang mendorong munculnya kota industri, maka setelah kemerdekaan perekonomian di kota Makassar sulit untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan munculnya Gerakan DI/ TII tahun 1950 di pedalaman Sulawesi Selatan, kemudian muncul Gerakan Permesta tahun 1957. Akibat adanya gerakan DI/TII serta Permesta, banyak masyarakat pedalaman Sulawesi Selatan yang memilih meninggalkan sawah, ladang dan ternak mereka untuk mencari tempat yang aman. Pada pertengahan 1960-an perekonomian Makassar mengalami kemerosotan, sehingga pembangunan dalam berbagai sektor terhambat.⁵⁴

Menjelang akhir tahun 1978 sampai awal 1979, tingkat pendapatan penduduk diwilayah kotamadya Ujung Pandang ternyata kurang lebih 75% penghasilannya dibawah 30.000,- perbulan sedangkan yang berpenghasilan antara 30.000 sampai 60.000 perbulan sekitar 18% dan yang diatas 60.000 sekitar 7%. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja sangat terbatas dan kebanyakan penduduk yang mencari kerja adalah tenaga yang pendidikannya tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.⁵⁵ Keluarga tukang becak dan buru harian

⁵³ A. Rasyid Asba, *Kopra Makassar Perebutan Pusat Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 184.

⁵⁴ Muh. Ali Hannapia, " *Makassar di bawah pemerintahan Aroepala 1960- 1965*" (Makassar: skripsi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, 2017), hlm.19.

⁵⁵ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang tahun 1926-1988. No.reg. 2196 mengenai laporan

misalnya yang rata-rata bermukim di pinggiran kota. Sebagian besar dari mereka memperoleh pendapatan antara 20.000 sampai dengan 40.000 tiap bulannya.⁵⁶

Dari tahun ke tahun Ujung Pandang sebagai kota terbesar di Indonesia Timur semakin memperlihatkan perkembangannya. Karenanya ekonomi menjadi hal yang paling utama untuk diperhatikan. Salah satu pusat perekonomian yang dapat membantu masyarakat yakni Kawasan pantai losari yang sekaligus menjadi salah satu Kawasan tempat wisata yang mulai ramai dikunjungi pada tahun 1970an.

Industri kecil dan menengah serta pedagang kaki lima mulai dibina dan dilatih pemerintah untuk membuat kerajinan dan usaha-usaha lainnya serta diberi fasilitas berupa tempat untuk menjual barang dagangannya. Selain itu, pemerintah lakukan upaya pembangunan dan perbaikan pasar seperti penambahan kios utama ditujukan kepada pedagang kaki lima. Dalam taraf hidup nelayan, peningkatan produksi perikanan ditinjau dari permintaan pasar dan penyediaan pangan rakyat.⁵⁷ Dari tahun 1979-1983 salah satu peningkatan perekonomian berasal dari hasil ternak yang tiap tahunnya mengalami peningkatan dimana sapi 25,6%, kerbau 4,1%, kuda 7,68%, kambing 12,5%, ayam 20%, dan itik 14,7%.⁵⁸

pertanggungjawaban walikota kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1979-1981 tentang kebijakan dan hambatan dalam pembangunan kota.

⁵⁶ Abu Hamid, *op.cit.* hlm. 81.

⁵⁷ Nuraeni Ma'mur, *Walikota Makassar Legenda di Timur, persembahan 400 Tahun Kota Makassar*, (Yapensi Jakarta dan Pemerintahan kota Makassar: 2007), hlm.51-52.

⁵⁸ Andi Mulya Sultani, *op.cit.* hlm. 31.

Pada 15 Oktober 1978, sempat dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai perkembangan harga terutama barang impor, serta adanya Kepres 30 tanggal 1 Mei 1980 yang membahas kenaikan bahan bakar minyak, yang kemudian ikut mempengaruhi harga sembako. Hal ini memicu keresahan bagi masyarakat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang secara langsung membantu masyarakat dengan terus membina dan memberikan bantuan motorisasi perahu nelayan di Barombong dan Bira, bantuan kerajinan perak di Maccini Sombala dan Barang Lompo, bantuan bagi pandai besi, geraba keramik di wilayah Jongaya, kerajinan rotan di wilayah Lette.⁵⁹

⁵⁹ Nuraeni Ma'mur, *op.cit.* hlm. 55-57.